

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2008 BRR NAD-NIAS

**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Ikhtisar Eksekutif	5
Bab I Pendahuluan	7
A. Gambaran Umum	7
Letak Geografis Provinsi NAD dan Kepulauan Nias	8
Sumber Daya Manusia	8
Sumber Dana	9
Sarana dan Prasarana	9
B. Tugas dan Kewenangan	9
C. Struktur Organisasi	11
D. Maksud dan Tujuan	13
E. Sistematika Penyajian	13
Bab II Perencanaan Strategis	15
A. Perencanaan Strategis	15
Visi dan Misi	15
Tujuan	17
B. Sasaran Strategis	17
C. Program dan Kegiatan Tahun 2008	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Metodologi Pengukuran Kinerja	29
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
Perkembangan Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	33
C. Akuntabilitas Keuangan	34
D. Pengakhiran Masa Tugas BRR	47
BAB IV Penutup	49
Lampiran	51
Perencanaan Strategi Tahun 2005 s.d. 2009	
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008	
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008	
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008	

KATA PENGANTAR

Sebagai lembaga sementara yang dibentuk dalam rangka mempercepat pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Kepulauan Nias paska bencana gempa bumi dan tsunami, BRR NAD Nias akan segera mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009, salah satu bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diterima BRR sebelum mengakhiri masa tugasnya adalah laporan kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya LAKIP ini diharapkan para stakeholder dapat menilai sejauh mana pencapaian kinerja BRR dibandingkan dengan sumberdaya yang dimilikinya.

Selama kurang lebih 4 (empat) tahun masa kerjanya sejak 2005 sampai dengan 2008, telah cukup banyak hasil yang dicapai oleh BRR dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Seluruh capaian kinerja BRR ini dapat dilihat dari LAKIP BRR yang dibuat setiap tahun.

Harus diakui bahwa keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias bukanlah merupakan hasil kerja BRR semata tetapi merupakan sinergi dari partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, baik dari unsur pemerintah pusat maupun daerah, swasta, NGO, lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu BRR mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berperan serta secara aktif dalam membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan kepulauan Nias.

Banda Aceh, Maret 2009

Kepala,

Koentoro Mangkusubroto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, tugas BRR NAD-Nias akan berakhir pada 16 April 2009, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2008 ini merupakan LAKIP terakhir sebelum BRR NAD-Nias resmi dibubarkan. Meskipun masih ada beberapa sisa kegiatan yang dilakukan menjelang berakhirnya masa tugas BRR sesuai Rencana Strategis tahun 2005-2009, namun hal tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi pencapaian kinerja BRR secara keseluruhan sebagaimana yang ditampilkan dalam LAKIP tahun 2008 ini.

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada gabungan dari hasil kegiatan seluruh satuan kerja BRR, sehingga dalam perspektif keseimbangan, kinerja sasaran yang dihasilkan merupakan hasil capaian dari beberapa satuan kerja. Berdasarkan indikator kinerja keluaran (*outputs*), rata-rata capaian kinerja BRR untuk tahun 2008 adalah sebesar **80,98%**. Sedangkan dari perspektif keuangan, realisasi penggunaan dana mencapai Rp7.625.820.619.607 atau **70,04%** dari total anggaran tahun 2008 sebesar Rp10.888.322.764.000,-.

Berdasarkan pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran, dapat disimpulkan bahwa BRR NAD-Nias telah cukup berhasil dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias sesuai amanat yang diberikan para stakeholder. Diharapkan sebelum BRR NAD Nias mengakhiri masa tugasnya pada April 2009 nanti kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sudah dapat kembali normal dan bahkan meningkat dibandingkan pada saat sebelum bencana gempa dan tsunami.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD- Nias), gambaran umum, maksud dan tujuan, tugas dan wewenang serta sistematika penyajian LAKIP.

BRR NAD - Nias merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana di Provinsi NAD – Nias dan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2005.

Untuk mempersingkat rantai birokrasi dan mengurangi batasan ruang gerak dalam rangka percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, maka BRR NAD - Nias berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

A. GAMBARAN UMUM

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, struktur organisasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terdiri dari atas Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Adapun Badan Pelaksana merupakan motor utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR NAD - Nias) berkantor pusat di Banda Aceh dan mempunyai kantor perwakilan di Nias. Untuk menjalankan fungsinya pada tahun anggaran 2008 BRR NAD - Nias mempunyai 103 satuan kerja (satker). Masing-masing satker tersebut menjalankan salah satu dari sepuluh bidang kerja yaitu:

1. Bidang Pengawasan
2. Bidang Keuangan dan Perencanaan
3. Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan
4. Bidang Ekonomi dan Usaha
5. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan
6. Bidang Perumahan dan Permukiman
7. Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan
8. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Sekretariat
10. Bidang Operasi

Letak Geografis Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

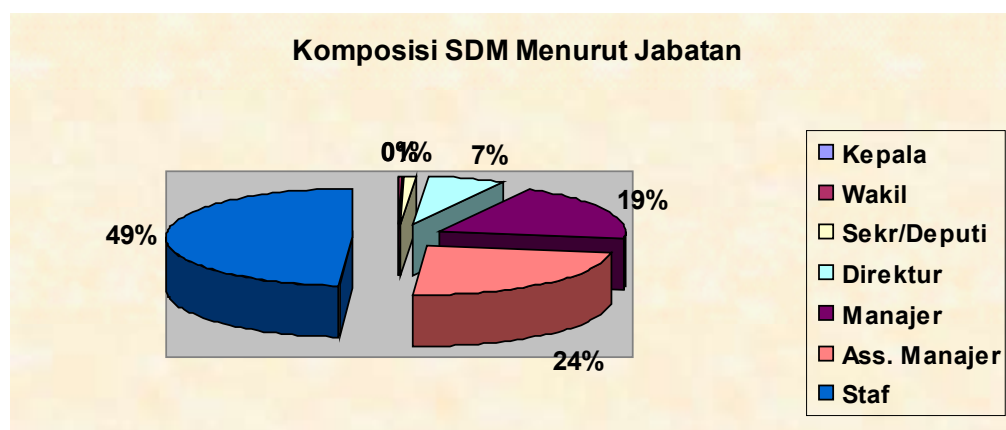
Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias berkantor pusat di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di ujung barat Indonesia. Dengan luas 57.365,57 km², Provinsi NAD memiliki 5 Kotamadya yaitu Kotamadya Banda Aceh, Kotamadya Langsa, Kotamadya Lhokseumawe, Kotamadya Sabang dan Kotamadya Subulussalam serta 18 kabupaten yaitu Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Gayo Lues, Bener Meriah dan Pidie Jaya.

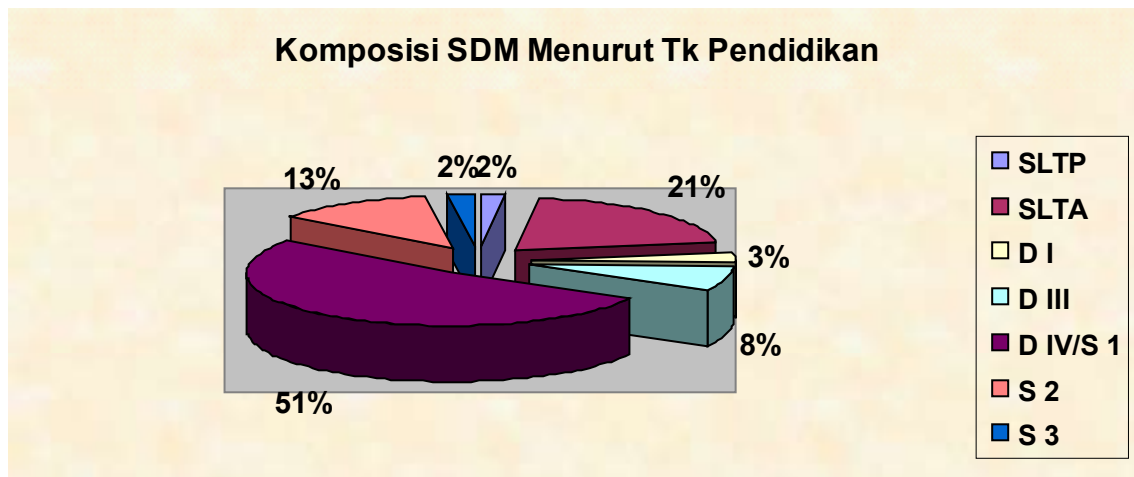
Selain di Banda Aceh, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias juga mempunyai kantor perwakilan di Nias. Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terletak di sebelah tenggara Pulau Simeulue Provinsi NAD. Kepulauan ini terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Sumber Daya Manusia

Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR NAD - Nias) didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan juga telah ditunjang dengan remunerasi yang memadai. Jumlah personil BRR NAD - Nias seluruhnya (per 31 Desember 2008) sebanyak 811 orang, yang terdiri dari Kepala Badan, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputi 10 orang, Direktur 54 orang, Manajer 154 orang, Asisten Manajer 193 orang, dan Senior Staf 393 orang. Sedangkan dari latar belakang pendidikan, SDM BRR NAD - Nias didominasi lulusan S-1/DIV yaitu sebanyak 423 orang, selanjutnya SMU sebanyak 167 orang, S-2 sebanyak 102 orang, D-III sebanyak 65 orang, D-I sebanyak 22 orang, S3 sebanyak 17 orang dan SLTP sebanyak 15 orang. Komposisi SDM tersebut dapat dilihat pada tabel dan bagan sebagai berikut:

MENURUT JABATAN	JUMLAH	MENURUT PENDIDIKAN	JUMLAH
Kepala Badan	1	Strata 3 (S-3)	17
Wakil Kepala Badan	1	Strata 2 (S-2)	102
Sekretaris Badan	1	Strata 1 (S1) dan Diploma IV	423
Deputi/Kepala	10	Diploma III (DIII)	65
Direktur	54	Diploma I (DI)	22
Manajer	154	SLTA	167
Asisten Manajer	193	SLTP	15
Senior Staf	397		
JUMLAH	811	JUMLAH	811





Sumber Dana

Pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias diperoleh dari APBN dan Non-APBN (dana dari *Non Government Organization* dan Negara Donor). Kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama 4 tahun diperkirakan berjumlah 60 trilyun atau USD 6,1 juta. Dari perkiraan kebutuhan dana tersebut, telah diperoleh komitmen sebesar Rp21 trilyun dari dana moratorium pada pos APBN, dan Rp 24 trilyun dari dana NGO/Donor.

Dana APBN untuk tahun anggaran 2008 tersedia sebesar **Rp10.888.322.764.000,-** yang terdiri dari DIPA Murni 2008 **Rp7.000.401.140.000,-** dan DIPA Luncuran sebesar **Rp3.887.921.624.000,-**. Total realisasi belanja per 31 Desember 2008 adalah sebesar **Rp7.625.820.619.607,-** atau sebesar **70,04%**.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, BRR NAD - Nias didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut:

- Gedung Kantor
- Ruang Pertemuan
- Alat transportasi, berupa kendaraan roda empat dan roda dua
- Jaringan Komputer
- Rumah Dinas Pegawai, bagi pegawai diluar Banda Aceh dan Nias

B. TUGAS & KEWENANGAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan, usaha dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan. BRR NAD - Nias sebagai organ utama rekonstruksi dan rehabilitasi mempunyai tugas:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional;
2. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana;
3. Menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana;

4. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran;
5. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka kerja sama dengan pihak lain;
6. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait;
8. Memastikan penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pelaksana BRR NAD – Nias mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengelola pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun keuangan dan teknologi untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tidak dibiayai dari APBN;
4. Mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri (asing) dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing);
5. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait.

Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan:

- a. Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
- b. Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah;
- c. Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial;
- d. Prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat-istiadat;
- e. Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
- f. Hak-hak atas tanah dan bangunan;
- g. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan
- h. Prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan kegiatan Rekonstruksi meliputi:

- a. Penataan ruang;
- b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta pemukiman;
- d. Pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;

- e. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan, serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat-istiadat;
- g. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
- h. Penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. Pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat; dan
- j. Pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana rinci.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2006, organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah
- b. Dewan Pengawas
- c. Badan Pelaksana

Susunan Dewan Pengarah terdiri dari:

Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Sekretaris	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (Kepala Bappenas)
Anggota	1. Menko Kesra 2. Menko Perekonomian 3. Menkeu 4. Menteri Pekerjaan Umum 5. Ketua DPRD Aceh 6. Gubernur Sumut 7. Kapolda NAD 8. Rektor Universitas Syiah Kuala 9. Rektor IAIN Arraniry 10. Muslimin Ibrahim 11. Surya Paloh 12. Badruzzaman 13. Arkian Zabua 14. Humam Hamid

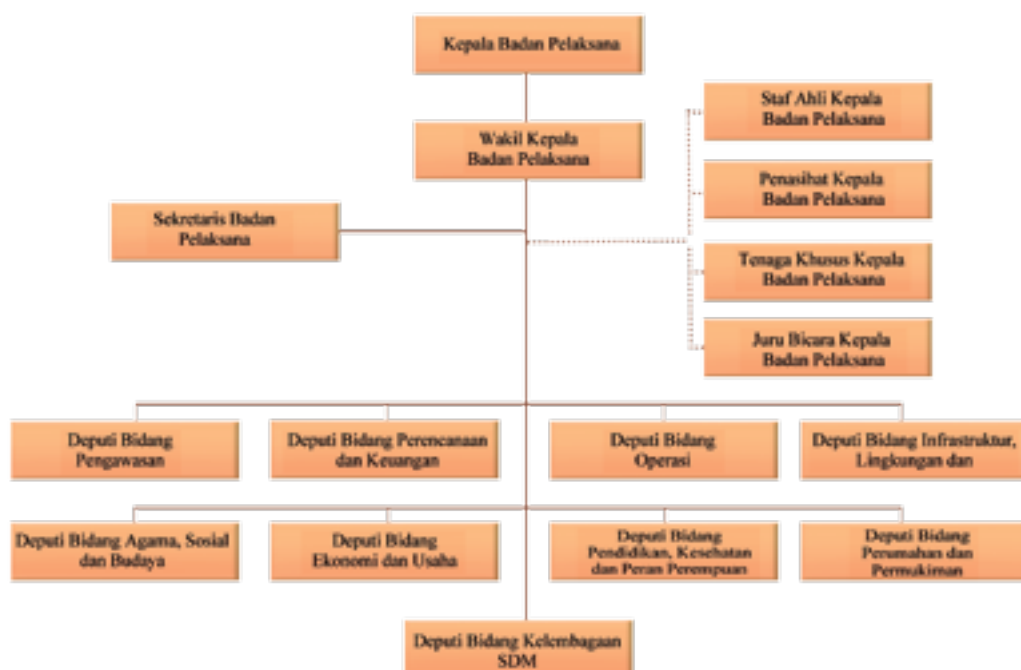
Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :

Ketua	Plt. Naimah Hasan
Sekretaris	Djunaidi Hadisumarto
Anggota	1. Emil Salim 2. Mari'e Muhammad 3. TB. Silalahi 4. Kanaka Puradireja 5. Djali Yusuf 6. Naimah Hasan 7. Kemal Stamboel

Susunan Badan Pelaksana terdiri dari :

Kepala	Kuntoro Mangkusubroto
Wakil Kepala	Gubernur NAD
Sekretaris	Faisal Putra
Deputi Bidang Pengawasan	Ramli Ibrahim
Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan	Amin Subekti
Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan	T. Safir Iskandar Wijaya
Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha	Said Faisal Baa'bud
Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman	Bambang Sudiatmo
Deputi/Kepala Operasi	Eddy Purwanto
Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	Cut Cayarani Bitai
Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	Bastian Sihombing
Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	Iqbal Farabi

Selanjutnya Struktur Badan Pelaksana dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



D. MAKSUD & TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR NAD - Nias) ini merupakan laporan realisasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias selama tahun 2008 sebagaimana diatur dalam :

1. Tap MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Keppres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum, maksud penyusunan LAKIP ini adalah untuk menilai sejauh mana capaian kinerja instansi yang berhasil diperoleh dan mengkomunikasikan capaian kinerja tersebut kepada para *stakeholder*. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pertama**, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan kinerja BRR NAD - Nias kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber dana dan sumber daya yang dipercayakan kepada BRR NAD - Nias khususnya pada tahun 2008, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis , sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2005 – 2009.
- Kedua**, dapat digunakan sebagai acuan (*benchmarking*) bagi instansi atau lembaga lain, khususnya bagi Badan Kesenambungan Rehab dan Rekon (BKRR) NAD dan Nias yang akan di bentuk setelah berakhirnya BRR NAD-Nias.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

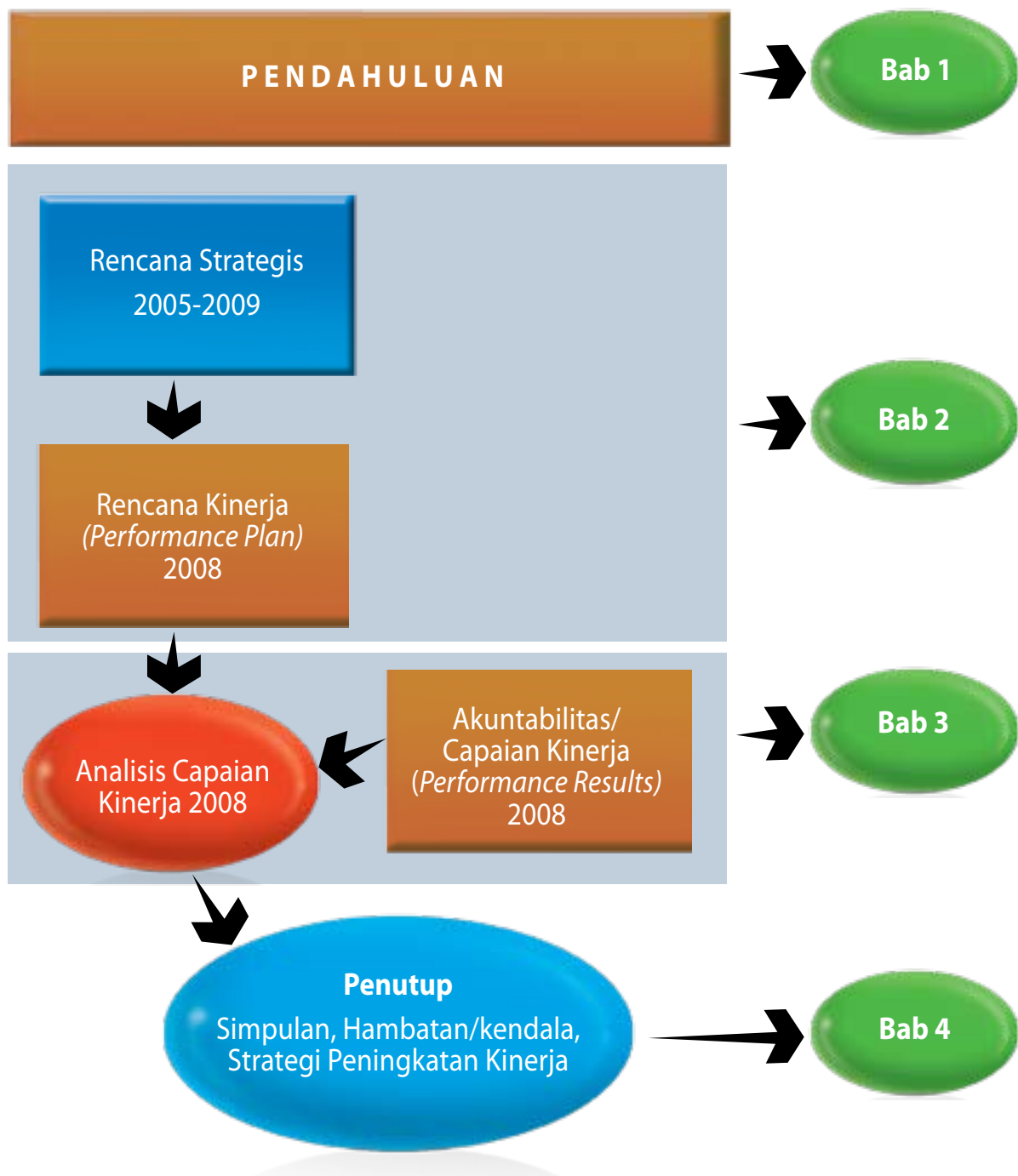
Sistematika penyajian LAKIP BRR NAD - Nias tahun 2008 sebagai berikut:

- **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sejauh mana pencapaiannya, apa kendala-kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif apa yang sudah dan akan diambil di masa yang akan datang.
- **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat profil Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD - Nias), struktur organisasi, tugas dan wewenang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematika penyusunan LAKIP.
- **Bab II – Rencana Strategis**, pada bab II ini akan dijelaskan secara singkat unsur-unsur Rencana Strategis BRR NAD - Nias Tahun 2005 – 2009 dan Rencana Kinerja Tahun 2008. Indikator sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan suatu dimensi yang dapat diukur (*measurable*) dan rasional. Dengan demikian diharapkan penilaian atas kinerja sasaran ini dapat menggambarkan pencapaian yang bersifat kuantitatif.
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2008, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang telah dan akan diambil. Selain itu, pada bab ini dijelaskan juga tentang akuntabilitas keuangan. Analisis

atas capaian akuntabilitas kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya *performance gap* yang ada sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

- **Bab IV – Penutup**, mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang telah dan akan diambil.
- **Lampiran-lampiran**

Dalam bentuk bagan, sistematika penyajian LAKIP BRR NAD - Nias tahun 2008 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

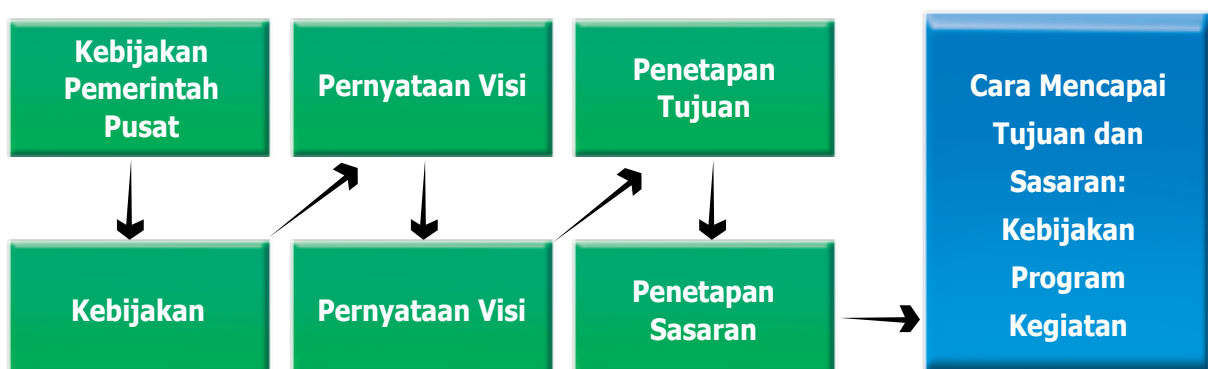
Bab II ini berisi uraian mengenai Perencanaan Strategis, keterkaitan Perencanaan Strategis dengan Sasaran dan Program, Program dan Kegiatan serta Perencanaan Kinerja tahun 2008.

Renstra yang digunakan oleh BRR NAD-Nias untuk tahun 2008 ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang merupakan revisi atas Renstra tahun 2005. Revisi Renstra tersebut untuk menyesuaikan program dan sasaran dengan perkembangan situasi dan kondisi Rehab dan Rekon di NAD dan Nias.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2005 - 2009 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dari hasil proses perencanaan strategis itulah kemudian dihasilkan rencana strategis.

Perencanaan Strategis BRR NAD - Nias mengikuti pola sebagai berikut :



Visi dan Misi

Pernyataan Visi

Sesuai tugas dan wewenang yang diemban sebagai penggerak rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias, maka Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD - Nias) Aceh-Nias menetapkan visi:

Mewujudkan masyarakat Aceh yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam serta memiliki harkat dan martabat Aceh dalam wawasan NKRI dan universal

Mewujudkan masyarakat Nias yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilai-nilai budaya dalam kerangka NKRI

Dengan visi tersebut, BRR NAD - Nias telah menempatkan dirinya sebagai motor penggerak untuk mewujudkan masyarakat Aceh dan Nias yang maju, aman dan damai, bermartabat, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat. Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan bagi segenap pimpinan dan seluruh personil yang terlibat dalam BRR NAD - Nias.

Pernyataan Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan demikian misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan, dalam rangka mencapai visi yang telah disepakati. Adapun 10 (sepuluh) misi yang harus dilaksanakan BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan (khusus NAD)
2. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ).
3. Mengembangkan dan mengelola sumberdaya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya.
4. Membangun kembali perumahan dan permukiman bagi korban bencana agar segera dapat hidup normal pada lokasi yang layak, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar yang memadai.
5. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien.
6. Membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul dan kompetitif serta adil berlandaskan ekonomi kerakyatan.
7. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kemampuan birokrasi daerah yang profesional, berwibawa, dan amanah.
9. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bernegara dalam wadah NKRI serta masyarakat dunia (khusus NAD).
10. Memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (khusus NAD).

Dengan misi tersebut diharapkan segenap personil BRR NAD - Nias dapat mengetahui peran masing-masing dan dapat merencanakan program-program serta target yang akan dicapai. Perumusan misi ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dari pihak-pihak terkait serta tetap antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Esensi yang tersirat dalam pernyataan misi diatas harus selalu menjadi acuan bagi segenap elemen BRR NAD - Nias dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Namun demikian, pernyataan misi saja tidak cukup untuk digunakan sebagai landasan bekerja bagi personil BRR NAD - Nias, karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang lebih konkret.

Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, harus ada perumusan lebih lanjut dari visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BRR NAD - Nias dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Penetapan tujuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang disusun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki.

Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan di atas, BRR NAD - Nias menetapkan sepuluh tujuan sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh dan Nias dalam bidang agama, sosial dan budaya
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sehingga mampu meraih kesempatan pekerjaan tidak saja di Aceh dan Nias, tapi juga di Indonesia dan dunia internasional
3. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya
4. Membangun kembali perumahan dan permukiman bagi korban bencana agar segera dapat hidup normal pada lokasi yang layak, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar yang memadai.
5. Membangun ekonomi wilayah yang unggul, kompetitif dan adil dengan memberi perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien
7. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan
8. Meningkatkan kemampuan dan kualitas birokrasi pemerintah daerah sehingga lebih profesional, berwibawa dan amanah
9. Membangun rekonsiliasi dan memperkuat solidaritas dan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI serta pergaulan masyarakat dunia
10. Memperkuat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan luas yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut harus mempunyai rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dapat dinilai, bersifat menantang dan mempunyai kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan).

Penetapan sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya BRR NAD - Nias dalam kegiatan atau operasional yang akan dilaksanakan tiap-tiap tahun. Sasaran-sasaran yang ditetapkan setiap tahun sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Baik sasaran maupun kegiatan, masing-masing ditetapkan indikator dan target kinerja untuk tahun yang bersangkutan, sehingga pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dapat direncanakan sedini mungkin dan pada akhir tahun dapat dievaluasi realisasi pencapaian kerjanya.

Dalam rangka mengimplementasikan sepuluh tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias menetapkan dua puluh tiga sasaran. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut dikelompokkan sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi tugas pokok BRR.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien, maka BRR NAD – Nias telah menyusun serangkaian strategi yang cukup rinci, yaitu meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Strategi adalah uraian mengenai cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi BRR NAD - Nias merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang dihadapi. Penetapan strategi ini dimaksudkan untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dengan telah ditetapkannya tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan ini, maka BRR NAD - Nias dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun ikhtisar 16 sasaran dan kegiatan BRR NAD - Nias yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja dan targetnya untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Bidang Agama, Sosial dan Budaya

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Berkembangnya kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Aceh dan Nias	Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan santri	4	Pkt
		Pembangunan gedung kantor	110	Pkt
		Pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah	597	Pkt
2	Normalnya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan berada pada keadaan yang lebih baik	Terbangunnya fasilitas pariwisata, seni dan budaya	11	Pkt
		Pemberian bantuan untuk orsos/yayasan/LSM	54	Pkt
		Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan masyarakat	23	Pkt
		Pemberian bantuan sosial	23	Pkt
		Pembangunan gedung khusus	81	Pkt

Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Gender

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peran perempuan yang merata di NAD dan kepulauan Nias	Tersedianya buku-buku pendidikan	1.011	Pkt
		Terbangunnya gedung pendidikan	445	Pkt
		Terbangunnya gedung kesehatan	306	Pkt
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	202	Pkt
		Terbangunnya gedung P2TP2	54	Pkt
		Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung	1	Pkt
		Terlaksananya bantuan penanggulangan dan kerusakan sosial	35	Pkt

Bidang Pengawasan

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias	Terlaksananya monitoring dan pengawasan program dan kegiatan	29	Pkt
		Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan	19.488	Pkt/ob
		Terselenggaranya sosialisasi/ workshop/diseminasi/ seminar/publikasi	12	Keg
		Terlaksananya administrasi kegiatan	16	Bln

Bidang Ekonomi

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Adanya konservasi sumber daya alam	Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi lahan	8	Bln
		Terlaksananya rehabilitasi kawasan hutan	140	Ha
		Pengembangan hasil hutan non kayu	14	Pkt
		Pengembangan hutan rakyat	1.220	Ha
		Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan	61	Pkt
		Rehabilitasi ekosistem	130	Ha
2	Terbentuknya struktur dan institusi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi	76	Pkt
		Pengembangan koperasi dan usaha kecil	14	Pkt
		Pelatihan ketrampilan tenaga kerja	38	Akt
		Bantuan usaha ekonomi produktif	13	Pkt
		Pengembangan kelembagaan keuangan mikro agribisnis	15	Pkt
3	Tergalinya potensi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh dan Nias yang berkelanjutan	Terlaksananya pengembangan terminal agribisnis/ sub terminal	1	Pkt
		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	39	Pkt
		Pembangunan pasar/waserda	13	Pkt
		Terlaksananya promosi pariwisata	3	Pkt
4	Bangkitnya kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan	Pengembangan sarana usaha pertanian	252	Ha
		Pembinaan dan pengembangan sistem pembudidayaan ikan	125	Pkt
		Terlaksananya peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan	15	Pkt
		Terlaksananya pengembangan usaha tani	8.270	Ha
		Terlaksananya pengembangan prasarana perikanan	323	Pkt
		Terlaksananya pengembangan mutu usaha perikanan skala kecil	8	Bln
		Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	8	Bln
		Teknologi budi daya peternakan	12	Pkt
		Terselenggaranya rehabilitasi kawasan pantai	2.803	Ha

Bidang Keuangan dan Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Terdapatnya suatu kajian ulang rencana pembangunan infrastruktur yang holistik	Terlaksananya monitoring dan pengawasan program dan kegiatan	33	Pkt
		Terlaksananya perencanaan umum	5	Pkt
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	1	Pkt

Bidang Perumahan

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Tergantinya dan terperbaikinya seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi standar minimum	Terlaksananya pengadaan tanah	22	Ls
		Terlaksananya pembuatan sertifikat tanah	1.924.807	Bid
		Terlaksananya penataan pertanahan	346.000	Bid
		Terlaksananya bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan	465	Pkt

Bidang Infrastruktur

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Tersedianya akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga	Terlaksananya pembangunan/peningkatan air dan jaringannya	78	Pkt
		Tersedianya sarana persampahan	110	Pkt
		Terlaksananya pembangunan jaringan penyediaan air bersih	137	Pkt
2	Terperbaikinya dan terbangunnya jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan di Aceh dan Nias	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan lokal	181	Pkt
		Terlaksananya pembangunan jalan arteri	132	Pkt
		Terlaksananya pembangunan jalan kolektor	106	Pkt
3	Terbangunnya dermaga, bandara, yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	Terlaksananya pembangunan dermaga	20	Pkt
		Terlaksananya pengadaan pembangunan kapal	6	Pkt
		Terlaksananya pembangunan terminal	15	Pkt
		Terlaksananya fasilitas keselamatan penerbangan	24	Pkt
4	Terbangunnya sistem drainase dan pengontrol banjir	Terlaksananya penyiapan dan pematangan lahan	8	Pkt
		Terlaksananya pembangunan prasarana pengendalian air	22	Pkt
		Terlaksananya pembangunan prasarana dan jaringan irigasi	10	Pkt
		Terlaksananya pembangunan prasarana pengaman pantai	5	Pkt
		Terlaksananya pembangunan jaringan drainase	25	Pkt
		Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	297	Pkt

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM

No	Sasaran	Indikator	Target	
1	Pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintahan dan prasarana	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	332	Pkt
		Terlaksananya pembangunan rumah negara	36	Pkt
		Terlaksananya pembangunan gedung khusus	48	Pkt
2	Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintah	Terlaksananya pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan	2	Pkt
		Penyelenggaraan pemerintahan umum daerah	2	Pkt

C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008

Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program yang mengarah pada pencapaian sasaran tertentu. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias telah menetapkan 18 program yang akan dilaksanakan melalui 240 kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel Daftar Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2008

No	Uraian Sasaran, Program dan Kegiatan
1	Berkembangnya kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Aceh dan Nias
1.1	<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan dalam rangka meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan</i>
1.1.1	Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wil I
1.1.2	Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wil II
1.1.3	Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wil III
1.1.4	Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wil IV
1.1.5	Terlaksananya Pemulihan dan pengembangan bidang agama, sosial dan budaya wil.V (DIPA-L)
1.1.6	Pemulihan dan pengembangan agama, sosial dan budaya NAD
1.1.7	Pemulihan dan pengembangan agama, sosial dan budaya Nias Selatan
2	Normalnya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan berada pada keadaan yang lebih baik
2.1	<i>Terlaksananya revitalisasi kegiatan sosial dan budaya masyarakat</i>
2.1.1	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah II
2.1.2	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga NAD - Nias Wilayah II
2.1.3	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah III
2.1.4	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah IV
2.1.5	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan NAD
2.1.6	Pembinaan kepemudaan dan olahraga NAD-Nias
2.1.7	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan Nias Selatan

3	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peran perempuan yang merata di NAD dan Nias
3.1	<i>Tercapainya rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan</i>
3.1.1	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA
3.1.2	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD
3.1.3	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
3.1.4	Pendidikan tinggi NAD
3.1.5	Rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)
3.1.6	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg-I
3.1.7	Pendidikan, kesehatan dan gender regional II
3.1.8	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg. III
3.1.9	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg IV
3.1.10	Pendidikan, kesehatan dan gender Wilayah V
3.1.11	Pelayanan kesehatan NAD-ADB
3.1.12	Pendidikan di Depag NAD
3.1.13	Kesehatan, pendidikan & gender Prov. NAD
3.1.14	Pelayanan kesehatan NAD
3.1.15	Pendidikan menengah lanjutan
3.1.16	Pelayanan kesehatan NAD (lanjutan)
3.1.17	Pendidikan, kesehatan dan peran perempuan kab Nias Selatan
3.1.18	Pelayanan kesehatan Nias (ADB)
3.1.19	Pendidikan kesehatan dan peran perempuan
3.1.20	Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan simeuleu
3.1.21	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II
3.1.22	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.I
3.2	<i>Tercapainya rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan</i>
3.2.1	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA
3.2.2	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD
3.2.3	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
3.2.4	Pendidikan tinggi NAD
3.2.5	Rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)
3.2.6	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg-I
3.2.7	Pendidikan, kesehatan dan gender regional II
3.2.8	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg. III
3.2.9	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg IV
3.2.10	Pendidikan, kesehatan dan gender Wilayah V
3.2.11	Pelayanan kesehatan NAD-ADB
3.2.12	Pendidikan di Depag NAD
3.2.13	Kesehatan, pendidikan & gender Prov. NAD
3.2.14	Pelayanan kesehatan NAD
3.2.15	Pendidikan menengah lanjutan
3.2.16	Pelayanan kesehatan NAD (lanjutan)

3.2.17	Pendidikan, kesehatan dan peran perempuan kab Nias Selatan
3.2.18	Pelayanan kesehatan Nias (ADB)
3.2.19	Pendidikan kesehatan dan peran perempuan
3.2.20	Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan simeuleu
3.2.21	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II
3.2.22	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.I
3.3	<i>Terlaksananya kesejahteraan pemberdayaan perempuan dan anak</i>
3.3.1	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA
3.3.2	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD
3.3.3	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
3.3.4	Pendidikan tinggi NAD
3.3.5	Rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)
3.3.6	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg-I
3.3.7	Pendidikan, kesehatan dan gender regional II
3.3.8	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg. III
3.3.9	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg IV
3.3.10	Pendidikan, kesehatan dan gender Wilayah V
3.3.11	Pelayanan kesehatan NAD-ADB
3.3.12	Pendidikan di Depag NAD
3.3.13	Kesehatan, pendidikan & gender Prov. NAD
3.3.14	Pelayanan kesehatan NAD
3.3.15	Pendidikan menengah lanjutan
3.3.16	Pelayanan kesehatan NAD (lanjutan)
3.3.17	Pendidikan, kesehatan dan peran perempuan kab Nias Selatan
3.3.18	Pelayanan kesehatan Nias (ADB)
3.3.19	Pendidikan kesehatan dan peran perempuan
4	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias
4.1.	<i>Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias</i>
4.1.1	Kesekretariatan NAD
4.1.2	Sekretariat wilayah I
4.1.3	Sekretariat wilayah II
4.1.4	Sekretariat wilayah III
4.1.5	Sekretariat wilayah IV
4.1.6	Sekretariat wilayah IV-L
4.1.7	Sekretariat wilayah VI Nias
4.1.8	Satuan anti korupsi NAD-Nias
4.1.9	Pengawasan NAD-Nias
4.1.10	Operasi Nad-Nias
5	Adanya konservasi sumber daya alam
5.1	<i>Tercapainya peningkatan di bidang kehutanan dan pengembangan kawasan pesisir</i>

5.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA
5.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD
5.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I
5.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II
5.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III
5.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V
5.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD
5.1.8	ETESP ADB Pertanian
5.1.9	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias Selatan
5.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV
6	Terbentuknya struktur dan institusi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
6.1	<i>Mewujudkan perkoperasian dan usaha kecil</i>
6.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA
6.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD
6.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I
6.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II
6.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III
6.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V
6.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD
6.1.8	ETESP ADB Pertanian
6.1.9	Ekonomi dan usaha Nias Kab. Nias Selatan
6.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV
7	Tergalinya potensi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh dan Nias yang berkelanjutan
7.1	<i>Terlaksananya pemulihan ekonomi kerakyatan</i>
7.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA
7.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD
7.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I
7.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II
7.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III
7.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V
7.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD
7.1.8	ETESP ADB Pertanian
7.1.9	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias Selatan
7.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV
8	Bangkitnya kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan
8.1	<i>Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pertanian, perikanan dan kelautan NAD-Nias</i>
8.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA
8.1.2	Pemulihan dan pengembangan pertanian, perikanan NAD
8.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I
8.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II
8.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III

8.1.6	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD
8.1.7	ETESP ADB Pertanian
8.1.8	Ekonomi dan usaha nias kab. nias selatan
8.1.9	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV
9	Terdapatnya suatu kajian rencana pembangunan infrastruktur yang holistik
9.1	<i>Tersedianya kajian perencanaan detil tata ruang dan laporan evaluasi manfaat</i>
9.1.1	Pembinaan keuangan dan perencanaan
10	Tergantinya dan terperbaikinya seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi standar minimum
10.1	<i>Terlaksananya pembangunan perumahan dan penataan lingkungan perumahan</i>
10.1.1	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. I
10.1.2	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. IA
10.1.3	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. II
10.1.4	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD-ADB
10.1.5	Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali Provinsi NAD
10.1.6	Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali/BPPK Simeuleu
10.1.7	Pengembangan perumahan dan permukiman Kota Calang
10.1.8	Bantuan sosial bertempat tinggal dan perbaikan rumah NAD
10.1.9	Prakarsa pembangunan partisipatif
10.1.10	Pengembangan perumahan dan permukiman (MDTF)
10.1.11	Penanggulangan kemiskinan di perkotaan
10.1.12	Penataan ruang dan lingkungan permukiman
10.1.13	Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias
10.1.14	Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah II
10.1.15	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wilayah III
10.1.16	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil.IV
10.1.17	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil.V
10.1.18	Pengembangan perumahan dan permukiman Kab.Nias
10.1.19	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah I
10.1.20	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah III
10.1.21	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah IV
10.1.22	Infrastruktur kawasan siap huni
10.1.23	Pengembangan perumahan dan permukiman kabupaten Nias
10.1.24	Pengelolaan pertanahan Nias
10.1.25	Pengembangan perumahan dan permukiman Nias Selatan
10.1.26	Pengelolaan pertanahan Nias Selatan
10.1.27	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II
10.1.28	Kedeputian perumahan dan permukiman
11	Tersedianya akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga
11.1	<i>Tersedianya sistem air minum / air limbah perkotaan dan perdesaan</i>

11.1.1	Lingkungan, drainase dan pengendalian banjir NAD
11.1.2	Pengembangan kawasan percontohan NAD
11.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
11.1.4	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V
11.1.5	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
11.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III
11.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah IV
11.1.8	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
11.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah V
11.1.10	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
11.1.11	Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum Kab. Nias Selatan
11.1.12	Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum Kab. Nias Selatan
11.1.13	infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan NAD
11.1.14	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi Nias
11.1.15	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP dan air minum Kab. Nias
11.1.16	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP dan air minum Kab. Nias
11.1.17	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil. I
12	Terbaiknya dan terbangunnya jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan di Aceh dan Nias
12.1	<i>Tercapainya pemulihan dan peningkatan pelayanan prasarana Jalan dan Jembatan</i>
12.1.1	Pembangunan jalan dan jembatan wil. I A
12.1.2	Pengembangan kawasan percontohan NAD
12.1.3	Jalan Nasional NAD
12.1.4	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi NAD
12.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IV
12.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V
12.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. I
12.1.8	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
12.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III
12.1.10	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan Wilayah II
12.1.11	Pemeliharaan, rehab, peningkatan dan pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias
12.1.12	Perencanaan, rehab dan rekon jalan provinsi dan ketenagalistrikan Kabupaten Nias
12.1.13	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten Nias
12.1.14	Rehab dan rekon jalan Kabupaten Nias Selatan
12.1.15	Pembinaan perencanaan jalan NAD
13	Terbangunnya dermaga, terminal dan bandara, yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
13.1	<i>Tercapainya pemeliharaan, rehabilitasi dan meningkatnya pembangunan transportasi darat, udara dan laut</i>
13.1.1	Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wil. IA
13.1.2	Rehab, peningkatan, pembangunan fasilitas pos, telekomunikasi dan transportasi udara NAD
13.1.3	Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut NAD
13.1.4	Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat NAD
13.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah V

13.1.6	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi nias
13.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
13.1.8	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III
13.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
13.1.10	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
13.1.11	Pemeliharaan, rehab, peningkatan dan pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias
13.1.12	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias
14	Terbangunnya sistem drainase dan pengontrol banjir
14.1	<i>Terlaksananya sistem pengelolaan persampahan, sistem pengairan dan pengendalian banjir yang andal</i>
14.1.1	Pembangunan prasarana pengendalian air NAD
14.1.2	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IA
14.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
14.1.4	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
14.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III
14.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah IV
14.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah V
14.1.8	Irigasi NAD
14.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V
14.1.10	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
14.1.11	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II
14.1.12	Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP & air minum Kab. Nias Selatan
14.1.13	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP dan air minum Kab.Nias
14.1.14	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.I
15	Pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintahan dan prasarana
15.1	<i>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana gedung negara</i>
15.1.1	Pembangunan infrastruktur pemerintah NAD
15.1.2	Rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Simeulue (IDB)
15.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IA
15.1.4	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
15.1.5	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II
15.1.6	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias
15.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I
15.1.8	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan Wilayah II
15.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan regional wilayah III
15.1.10	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan regional wilayah IV
15.1.11	peningkatan kapasitas rekonstruksi infrastruktur NAD
15.1.12	Perencanaan, rehab & rekon jalan provinsi dan ketenagalistrikan Kabupaten Nias
15.1.13	Rehab & rekon jalan kabupaten Nias Selatan
15.1.14	Penyelenggaraan dan pendaftaran bangunan gedung negara dan rumah negara NAD
15.1.15	Pengembangan fasilitas Polri
15.1.16	Kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia Wil I

15.1.17	Kelembagaan dan pengembangan SDM wilayah IV
15.1.18	Peningkatan dan penataan kapasitas kelembagaan NAD-Nias
15.1.19	Pusat pembelajaran dan pengembangan SDM
15.1.20	Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pulau Simeulue
16	Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintah
16.1	<i>Terselenggaranya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang profesional di NAD-Nias</i>
16.1.1	Dukungan bantuan pemerintah daerah-SPADA L
16.1.2	Peningkatan sarana dan prasarana gedung keuangan negara
16.1.3	Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Wil. V
16.1.4	Penataan dan Pengelolaan SDM Aparatur NAD NIAS
16.1.5	TNI angkatan udara L
16.1.6	Pengembangan Sarpras Hukum NAD
16.1.7	Penguatan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias

Rincian mengenai sasaran, program dan kegiatan termasuk indikator kinerja (masukan, keluaran) dan targetnya dapat dilihat pada lampiran 3 dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan tahun 2008.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III ini akan menguraikan beberapa hal mengenai metode pengukuran kinerja, capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencapaian kinerja BRR NAD – Nias tahun 2008 .

LAKIP tahun 2008 ini disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2008 . Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan komitmen dari manajemen puncak dan seluruh anggota organisasi.

A. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut terdiri dari indikator dan target kinerja sasaran dan kegiatan yang keduanya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2008 . Kemudian pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas celah kinerja yang ada diuraikan penyebab terjadinya dan rencana tindakan dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja kegiatan dapat meliputi masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Indikator sasaran merupakan rangkuman dari indikator-indikator kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan.

Dalam mengukur kinerja LAKIP BRR NAD-Nias tahun 2008 ini, untuk indikator kinerja kegiatan digunakan 2 (dua) jenis indikator kinerja, yaitu indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*). Penggunaan dua jenis indikator ini dikarenakan belum adanya sistem informasi yang dapat memberikan data yang dapat mengukur seluruh kinerja hasil (*outcomes*) secara komprehensif. Namun demikian untuk beberapa bidang sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berhasil diidentifikasi capaian kinerja hasil (*outcomes*) secara kumulatif s/d tahun 2008 (*pengungkapan capaian kinerja hasil (outcomes) ini hanya merupakan informasi tambahan dan tidak dimaksudkan sebagai bagian dari perhitungan tingkat capaian kinerja LAKIP BRR secara keseluruhan karena tingkat capaian kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran yang tercakup dalam Renstra, sesuai tabel kinerja hasil/outcomes*).

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran, digunakan indikator-indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator *output*. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2008 . Uraian target dan realisasi dari sasaran dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran dan pada **Lampiran 4** pada Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Dari rincian formulir pengukuran kinerja pada Lampiran 3 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Lampiran 4, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pelaksana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi untuk tahun anggaran 2008 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2008, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari enam belas sasaran sebesar **80,98%** atau dengan predikat **“Baik”**. Namun demikian masih ada satu sasaran yang tingkat pencapaiannya kurang baik, karena pada umumnya disebabkan oleh terbatasnya waktu pengerjaan/pelaksanaan kegiatan.

Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Berkembangnya kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Aceh dan Nias	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah	PKT	597	550	92,13
		Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengembangan santri	PKT	4	2	50,00
		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	PKT	110	82	74,55
Rata-rata capaian sasaran-1						72,2
2	Normalnya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan berada pada keadaan yang lebih baik	Terbangunnya fasilitas pariwisata, seni dan budaya	PKT	11	11	100,00
		Tersedianya bantuan untuk orsos/ yayasan/lsm	PKT	54	48	88,89
		Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan masyarakat	PKT	23	23	100,00
		Terlaksananya pemberian bantuan sosial	PKT	23	21	91,30
		Terlaksananya pembangunan gedung khusus	PKT	81	59	72,84
Rata-rata capaian sasaran-2						90,6
3	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peran perempuan yang merata di Provinsi NAD dan kepulauan Nias	Tersedianya buku-buku pendidikan	PKT	1011	714	70,62
		Terbangunnya gedung kesehatan	PKT	306	264	86,27
		Terbangunnya gedung pendidikan	PKT	445	370	83,15
		Terlaksananya bantuan penanggulangan dan kerusakan sosial	PKT	35	35	100,00
		Terbangunnya gedung P2TP2	PKT	54	35	64,81
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	PKT	202	84	41,58
		Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung	PKT	1	1	100,00
Rata-rata capaian sasaran-3						78,06
4	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias	Terlaksananya monitoring dan pengawasan program dan kegiatan	PKT	29	25	86,21
		Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan	PKT/OB	19.844.00	18.684.28	94,15
		Terselenggaranya sosialisasi/workshop/ diseminas/seminar/publikasi	KALI	12	3	25,00
		Terlaksananya administrasi kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan dengan lancar	BLN	16	16	100,00
Rata-rata capaian sasaran-4						76,34

5	Adanya konservasi sumberdaya alam	Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi lahan	BLN	8	8	100,00
		Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi kawasan hutan	HA	140	140	100,00
		Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	PKT	14	11	78,57
		Pengembangan Hutan Rakyat	HA	1220	1220	100,00
		Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan	PKT	61	52	85,25
		Rehabilitasi Ekosistem	HA	130	100	76,92
Rata-rata capaian sasaran-5						90,1
6	Terbentuknya struktur dan institusi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi	PKT	76	75	98,68
		Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil	PKT	14	8	57,14
		Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja	AKT	38	2	5,26
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	PKT	13	10	76,92
		Pengembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis	PKT	15	15	100,00
Rata-rata capaian sasaran-6						67,6
7	Terdapatnya suatu kajian ulang rencana pembangunan infrastruktur yang holistik	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan	PKT	33	10	30,30
		Terlaksananya perencanaan umum	PKT	5	5	100,00
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	PKT	1	1	100,00
Rata-rata capaian sasaran-7						76,77
8	Tergalinya potensi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh dan Nias yang berkelanjutan	Terlaksananya pengembangan terminal agribisnis/sub terminal	PKT	1	1	100,00
		Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor	PKT	39	29	74,36
		Pembangunan Pasar/Waserda	PKT	13	12	92,31
		Terlaksananya promosi pariwisata	PKT	3	0	0,00
Rata-rata capaian sasaran-8						66,67
9	Bangkitnya kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan	Pengembangan sarana usaha pertanian	HA	252	250	99,21
		Pembinaan dan pengembangan sistem pembudidaya ikan	PKT	125	36	28,80
		Terlaksananya peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan	PKT	15	12	80,00
		Terlaksananya pengembangan usaha tani	HA	8270	7482	90,47
		Terlaksananya pengembangan prasarana perikanan	PKT	323	272	84,21
		Terlaksananya pengembangan mutu usaha perikanan skala kecil	BLN	8	8	100,00
		Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	BLN	8	8	100,00
		Teknologi budi daya peternakan	PKT	12	11	91,67
		Terselenggaranya rehabilitasi kawasan pantai	HA	2803	2803	100,00
Rata-rata capaian sasaran-9						86,04

10	Tergantinya dan terbaiknya seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi standar minimum	Terlaksananya pengadaan tanah	LS	22	16	72,73
		Terlaksananya pembuatan sertifikat tanah	BID	1.900	426	20,42
		Terlaksananya penataan pertanahan	BID	346000	13363	3,86
		Terlaksananya bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan	PKT	465	453	97,42
Rata-rata capaian sasaran-10						43,5
11	Tersedianya akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan saluran air dan jaringannya	PKT	78	69	88,46
		Tersedianya sarana persampahan	PKT	110	63	57,27
		Terlaksananya pembangunan jaringan penyediaan air bersih	PKT	137	135	98,54
Rata-rata capaian sasaran-11						81,42
12	Terbaiknya dan terbangunnya jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan di Aceh dan Nias	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan lokal	PKT	181	160	88,40
		Terlaksananya pembangunan jalan arteri	PKT	132	129	97,73
		Terlaksananya pembangunan jalan kolektor	PKT	106	97	91,51
Rata-rata capaian sasaran-12						92,54
13	Terbangunnya dermaga, bandara, fasilitas kereta api yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	Terlaksananya pembangunan dermaga	PKT	20	11	55,00
		Terlaksananya pengadaan pembangunan kapal	PKT	6	6	100,00
		Terlaksananya pembangunan terminal	PKT	15	14	93,33
		Terlaksananya fasilitas keselamatan penerbangan	PKT	24	23	95,83
Rata-rata capaian sasaran-13						86,04
14	Terbangunnya sistem drainase dan pengontrol banjir yang baru	Terlaksananya penyiapan dan pematangan lahan	PKT	8	7	87,50
		Terlaksananya pembangunan prasarana pengendalian air	PKT	22	22	100,00
		Terlaksananya pembangunan prasarana dan jaringan irigasi	PKT	10	6	60,00
		Terlaksananya pembangunan prasarana pengaman pantai	PKT	5	5	100,00
		Terlaksananya pembanguan jaringan drainase	PKT	25	22	88,00
		Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	PKT	297	304	102,36
Rata-rata capaian sasaran-14						89,64
15	Pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintahan dan prasarana	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	PKT	332	328	98,80
		Terlaksananya pembangunan rumah negara	PKT	36	36	100,00
		Terlaksananya pembangunan gedung khusus	PKT	48	46	95,83
Rata-rata capaian sasaran-15						98,2

16	Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintah	Terlaksananya pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan	PKT	2	2	100,00
		Penyelenggaraan pemerintahan umum daerah	PKT	2	2	100,00
Rata-rata capaian sasaran-16						100
Rata-rata capaian sasaran total						80,98

Dari tabel di atas dapat dilihat sasaran dengan tingkat capaian sasaran dengan predikat sangat baik, adalah pada indikator sasaran ke 16 yakni "Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintah" dengan tingkat capaian sasaran sebesar 100%. Ini berarti bahwa seluruh target indikator kinerja pada sasaran ini telah tercapai dengan baik.

Perkembangan Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Di samping melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didukung dana DIPA Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara langsung, BRR juga mengkoordinir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, tidak kurang 124 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM nasional, beberapa lembaga donor dan lembaga PBB, berbagai instansi pemerintah, instansi militer dan lain-lain yang secara bersama-sama melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Gambaran beberapa kinerja hasil (outcomes) yang dicapai dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dibawah kendali dan koordinasi BRR sejak tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2008 yang telah dicapai dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel : kinerja hasil (outcomes) sd akhir tahun 2008

No	Bidang	Indikator	Tingkat Capaian
1	Pendidikan, Kesehatan dan Gender	Kesehatan anak	Sekitar 71% anak usia 1 tahun sudah mendapat imunisasi campak
2	Pendidikan, Kesehatan dan Gender	Anak usia sekolah (Pendidikan)	99% anak usia SD di Aceh dan 95% di Nias terdaftar sebagai pelajar
3	Infrastruktur	Telekomunikasi	Akses telepon selular merata di setiap kabupaten di Aceh, mencakup kurang lebih 35% rumah tangga
4	Infrastruktur	Listrik	97% rumah tangga mendapat aliran energi listrik
	Infrastruktur	Pengelolaan sampah/limbah	Lebih dari 36 km pengaman pantai, 21 km tanggul air asin telah dibangun, 17.672 m ³ limbah kayu ditampung utk dimanfaatkan lagi, 2.5 juta m ³ kayu telah didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan lagi.
5	Perumahan	Dokumen kepemilikan tanah	80% korban tsunami mendapatkan tanahnya kembali
6	Ekonomi	Akses terhadap kredit mikro	60% usaha kecil memiliki akses terhadap kredit. Terdapat 62.000 kredit mikro kepada 4% rumah tangga di NAD dan 1.5% rumah tangga di Nias
7	Ekonomi	Perikanan dan kelautan	Produksi perikanan laut saat ini mencapai 25% diatas tingkat produksi sebelum tsunami 2004.

8	Ekonomi	Kolam ikan/produksi perikanan laut tawar	Produksi ikan mencapai 35.000 ton lebih, mendekati tingkat sebelum tsunami.
9	Ekonomi	Pertanian/beras	Pada tahun 2007 produksi beras mencapai 1.535.375 ton melebihi tingkat sebelum tsunami
10	Ekonomi	Produksi kopi	Tahun 2007 produksi kopi mencapai 42.308 ton melebihi tingkat produksi sebelum tsunami
11	Ekonomi	Tenaga kerja	Tingkat pengangguran di Aceh saat ini cenderung meningkat seiring dengan penurunan kegiatan rehab rekon, diperkirakan mencapai angka 9%.
12	Ekonomi	Angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan di Aceh menurun dari angka 30% pada 2003 menjadi 27% pada tahun 2007, namun masih diatas angka rata-rata nasional sebesar 15%.

Sumber data: Pusdatin BRR NAD-Nias (based on UNICEF, BRR, TRIP and BPS report)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran BRR NAD-Nias yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2008 , kegiatan BRR dibiayai dari APBN yang dituangkan dalam DIPA 2008 dan DIPA Luncuran tahun 2007. Realisasi keuangan tahun 2008 yang bersumber dari APBN telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran BRR NAD-Nias tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Satker/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Berkembangnya kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Aceh dan Nias	1.1.1 Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias I	135,117,376	132,857,772	98.33
		1.1.2 Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wilayah II	18,508,034	18,203,923	98.36
		1.1.3 Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wilayah-III	24,023,454	23,818,315	99.15
		1.1.4 Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan NAD-Nias Wilayah-IV	6,816,488	5,188,060	76.11
		1.1.5 Terlaksananya DIPA-L Pemulihan dan pengembangan bidang agama,sosial dan budaya wil.V	4,346,899	3,123,915	71.87
		1.1.6 Pemulihan dan pengembangan agama,sosial dan budaya NAD	53,454,462	51,863,294	97.02
		1.1.7 Pemulihan dan pengembangan agama,sosial dan budaya Nias Selatan	78,790,774	71,044,109	90.17

2	Normalnya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan berada pada keadaan yang lebih baik	2.1.1	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah II	72,615,348	68,363,272	94.14
		2.1.2	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga NAD - Nias Wilayah II	4,295,956	4,238,656	98.67
		2.1.3	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah III	7,969,887	7,592,084	95.26
		2.1.4	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan wilayah IV	9,441,655	9,146,327	96.87
		2.1.5	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan NAD	1,769,208	1,557,353	88.03
		2.1.6	Pembinaan kepemudaan dan olahraga NAD-Nias	3,593,945	3,593,730	99.99
		2.1.7	Pemulihan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan Nias Selatan	19,482,495	12,572,795	64.53
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peran perempuan yang merata di NAD dan Nias	3.1.1	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA	37,329,749	32,961,563	88.30
		3.1.2	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD	271,350	148,398	54.69
		3.1.3	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah	386,347,650	317,701,473	82.23
		3.1.4	Pendidikan tinggi NAD	17,827,071	15,638,711	87.72
		3.1.5	Rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)	84,885,537	2,685,107	3.16
		3.1.6	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg-I	27,664,641	27,040,015	97.74
		3.1.7	Pendidikan, kesehatan dan gender regional II	4,618,659	3,724,847	80.65
		3.1.8	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg. III	24,447,123	24,103,978	98.60
		3.1.9	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg IV	2,701,243	2,003,988	74.19
		3.1.10	Pendidikan, kesehatan dan gender Wilayah V	16,587,278	16,513,014	99.55
		3.1.11	Pelayanan kesehatan NAD-ADB	25,968,326	7,253,102	27.93
		3.1.12	Pendidikan di Depag NAD	1,216,437	387,185	31.83
		3.1.13	Kesehatan, pendidikan & gender Prov. NAD	5,237,782	714,642	13.64
		3.1.14	Pelayanan kesehatan NAD	381,105	227,780	59.77
		3.1.15	Pendidikan menengah lanjutan	4,019,987	159,100	3.96

3.1.16	Pelayanan kesehatan NAD (lanjutan)	380,669	215,534	56.62
3.1.17	Pendidikan, kesehatan dan peran perempuan kab Nias Selatan	21,928,868	20,033,947	91.36
3.1.18	Pelayanan kesehatan Nias (ADB)	9,080,142	1,829,710	20.15
3.1.19	Pendidikan kesehatan dan peran perempuan	14,543,117	10,757,920	73.97
3.1.20	Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan simeuleu	2,196,355	2,196,335	100.00
3.1.21	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II	2,424,104	2,057,837	84.89
3.1.22	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.I	4,584,307	3,421,808	74.64
3.1.23	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA	8,828,758	8,820,265	99.90
3.1.24	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD	1,620,800	934,839	57.68
3.1.25	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah	30,535,745	20,997,112	68.76
3.1.26	Pendidikan tinggi NAD	5,852,763	5,486,087	93.73
3.1.27	Rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)	450,000	369,515	82.11
3.1.28	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg-I	30,849,352	28,368,810	91.96
3.1.29	Pendidikan, kesehatan dan gender regional II	10,563,224	9,104,586	86.19
3.1.30	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg. III	32,653,314	28,404,655	86.99
3.1.31	Pendidikan, kesehatan dan gender Reg IV	13,726,166	7,012,153	51.09
3.1.32	Pendidikan, kesehatan dan gender Wilayah V	6,907,257	6,715,708	97.23
3.1.33	Pelayanan kesehatan NAD-ADB	56,023,136	22,751,809	40.61
3.1.34	Pendidikan di Depag NAD	31,979	25,000	78.18
3.1.35	Kesehatan, Pendidikan & Gender Prov. NAD	7,275,287	3,182,027	43.74
3.1.36	Pelayanan Kesehatan NAD	3,038,495	2,836,801	93.36
3.1.37	Pendidikan Menengah Lanjutan	301,179	208,130	69.11
3.1.38	Pelayanan Kesehatan NAD (lanjutan)	5,067,283	945,229	18.65
3.1.39	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan kab nias selatan	6,548,126	5,263,451	80.38
3.1.40	Pelayanan Kesehatan nias (ADB)	28,480,928	18,873,221	66.27
3.1.41	Pendidikan Kesehatan dan Peran Perempuan	18,605,981	17,608,077	94.64

		3.1.42	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II	3,676,179	3,473,291	94.48
		3.1.43	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.I	1,683,000	1,549,971	92.10
		3.1.44	Pendidikan, kesehatan dan gender regional IA	5,685,235	5,632,116	99.07
		3.1.45	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi NAD	21,313,700	16,542,128	77.61
		3.1.46	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah/madrasah	19,544,272	15,322,707	78.40
		3.1.47	Pendidikan tinggi NAD	15,998,827	15,099,884	94.38
		3.1.48	Rehabilitasi dan Rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (IDB)	15,281,100	48,000	0.31
		3.1.49	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg-I	3,927,825	2,944,798	74.97
		3.1.50	Terlaksananya pendidikan, kesehatan dan gender regional II	28,973,454	27,739,620	95.74
		3.1.51	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg. III	8,848,273	8,436,775	95.35
		3.1.52	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Reg IV	1,127,140	811,528	72.00
		3.1.53	Pendidikan, Kesehatan dan Gender Wilayah V	962,981	551,107	57.23
		3.1.54	Pelayanan Kesehatan NAD-ADB	9,906,285	4,432,616	44.75
		3.1.55	Pendidikan DI Depag NAD	386,657	198,088	51.23
		3.1.56	Kesehatan, Pendidikan & Gender Prov. NAD	7,490,919	4,379,227	58.46
		3.1.57	Pelayanan Kesehatan NAD	4,880	1,596	32.70
		3.1.58	Pelayanan Kesehatan NAD (lanjutan)	775,179	670,168	86.45
		3.1.59	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan kab nias selatan	1,242,198	471,724	37.97
		3.1.60	Pelayanan kesehatan Nias (ADB)	11,688,047	6,701,482	57.34
		3.1.61	Pendidikan Kesehatan dan Peran Perempuan	3,257,133	2,911,543	89.39
4	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi NAD - Nias	4.1.1	Sekretariat NAD	390,007,520	346,875,608	88.94
		4.1.2	Sekretariat wilayah I	13,188,552	11,616,526	88.08
		4.1.3	Sekretariat wilayah II	7,054,416	5,811,271	82.38
		4.1.4	Sekretariat wilayah III	4,186,153	3,112,639	74.36
		4.1.5	Sekretariat wilayah V	4,820,083	4,641,604	96.30
		4.1.6	Sekretariat wilayah IV-L	1,186,347	752,539	63.43
		4.1.7	Sekretariat wilayah VI Nias	13,440,148	13,259,566	98.66
		4.1.8	Satuan anti korupsi NAD-Nias	8,669,350	6,618,949	76.35
		4.1.9	Pengawasan NAD-Nias	27,386,262	25,859,922	94.43
		4.1.10	Operasi Nad-Nias	107,617,809	78,392,094	72.84

5	Adanya konservasi sumber daya alam	5.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA	778,952	761,480	97.76
		5.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD	10,927,044	10,107,582	92.50
		5.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I	84,974,703	66,925,375	78.76
		5.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II	9,110,848	8,858,941	97.24
		5.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III	2,165,218	1,539,950	71.12
		5.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V	17,088,569	16,551,525	96.86
		5.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD	39,130,536	18,312,191	46.80
		5.1.8	ETESP ADB Pertanian	26,902,987	20,946,143	77.86
		5.1.9	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias Selatan	3,416,963	2,673,475	78.24
		5.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV	369,789	289,992	78.42
6	Terbentuknya struktur dan institusi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA	18,832,728	18,657,728	99.07
		6.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD	28,381,898	19,514,237	68.76
		6.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I	49,417,458	40,936,208	82.84
		6.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II	3,566,268	3,359,716	94.21
		6.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III	10,801,280	9,756,756	90.33
		6.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V	3,260,900	3,204,012	98.26
		6.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD	20,259,881	16,901,628	83.42
		6.1.8	ETESP ADB Pertanian	19,553,449	16,047,545	82.07
		6.1.9	Ekonomi dan usaha Nias Kab. Nias Selatan	339,737	220,298	64.84
		6.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV	5,154,770	2,318,126	44.97
7	Tersedianya kajian perencanaan detil tata ruang dan laporan evaluasi manfaat	7.1.1	Pembinaan keuangan dan perencanaan	114,225,132	35,892,651	31.42
8	Terjalinnya potensi fungsi bagi pertumbuhan ekonomi NAD - Nias yang berkelanjutan	8.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA	35,000	35,000	100.00
		8.1.2	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha NAD	8,496,756	7,853,867	92.43
		8.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I	4,545,193	2,473,496	54.42

		8.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II	30,471,743	30,088,350	98.74
		8.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III	4,139,962	3,465,879	83.72
		8.1.6	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil V	27,031,614	21,374,064	79.07
		8.1.7	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD	14,581,647	10,235,506	70.19
		8.1.8	ETESP ADB Pertanian	7,945,384	6,669,756	83.95
		8.1.9	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias Selatan	2,194,221	2,076,198	94.62
		8.1.10	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV	223,600	85,031	38.03
9	Bangkitnya kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan	9.1.1	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah IA	4,752,217	4,751,996	100.00
		9.1.2	Pemulihan dan pengembangan pertanian, perikanan NAD	55,449,352	45,103,055	81.34
		9.1.3	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah I	14,918,015	9,139,290	61.26
		9.1.4	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah II	4,505,663	4,274,704	94.87
		9.1.5	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wilayah III	9,970,748	8,044,271	80.68
		9.1.6	ETESP ADB Perikanan 2007 NAD	60,510,821	25,071,424	41.43
		9.1.7	ETESP ADB Pertanian	33,331,495	27,705,190	83.12
		9.1.8	Ekonomi dan usaha nias kab. nias selatan	401,733	386,235	96.14
		9.1.9	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha wil IV	7,497,993	5,082,798	67.79
10	Tergantinya dan terperbaikinya seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi standar minimal	10.1.1	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. I	156,167,432	144,244,604	92.37
		10.1.2	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. IA	70,052,913	68,322,284	97.53
		10.1.3	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil. II	13,176,184	12,567,130	95.38
		10.1.4	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD-ADB	168,405,021	81,027,316	48.11
		10.1.5	Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali Provinsi NAD	259,256,597	237,653,606	91.67
		10.1.6	Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali/BPPK Simeuleu	57,451,383	56,385,751	98.15
		10.1.7	Pengembangan perumahan dan permukiman Kota Calang	34,687,579	32,696,651	94.26
		10.1.8	Bantuan sosial bertempat tinggal dan perbaikan rumah NAD	180,020,162	170,086,611	94.48
		10.1.9	Prakarsa pembangunan partisipatif	41,693,266	20,568,900	49.33

		10.1.10	Pengembangan perumahan dan permukiman (MDTF)	292,132,138	146,389,539	50.11
		10.1.11	Penanggulangan kemiskinan di perkotaan	103,061,614	18,349,119	17.80
		10.1.12	Penataan ruang dan lingkungan permukiman	20,940,957	16,306,951	77.87
		10.1.13	Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias	349,631,265	106,313,670	30.41
		10.1.14	Bantuan perumahan dan permukiman NAD wilayah II	134,376,473	117,843,369	87.70
		10.1.15	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wilayah III	708,864	588,346	83.00
		10.1.16	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil.IV	20,326,754	17,284,722	85.03
		10.1.17	Bantuan perumahan dan permukiman NAD Wil.V	95,322,682	90,433,012	94.87
		10.1.18	Pengembangan perumahan dan permukiman Kab.Nias	103,315,570	96,586,581	93.49
		10.1.19	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah I	10,065,158	9,663,023	96.00
		10.1.20	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah III	533,176	230,443	43.22
		10.1.21	Pengembangan perumahan dan permukiman NAD Wilayah IV	12,347,581	10,444,923	84.59
		10.1.22	Infrastruktur kawasan siap huni	130,795,742	120,631,604	92.23
		10.1.23	Pengembangan perumahan dan permukiman Nias Selatan	130,440,951	88,091,618	67.53
		10.1.24	Pengelolaan pertanahan Nias Selatan	776,202,494	467,365,898	60.21
		10.1.25	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil.II	8,359,143	7,208,115	86.23
		10.1.26	Kedeputian perumahan dan permukiman	73,064,202	15,815,554	21.65
11	Tersedianya akses air bersih dan sehat bagi seluruh warga	11.1.1	Lingkungan, drainase dan pengendalian banjir NAD	11,367,072	10,576,666	93.05
		11.1.2	Pengembangan kawasan percontohan NAD	345,527	9,539	2.76
		11.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	38,512,411	33,111,459	85.98
		11.1.4	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V	26,778,641	24,923,185	93.07
		11.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III	3,833,696	3,696,400	96.42
		11.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah II	545,533	544,831	99.87
		11.1.7	Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum Kab. Nias Selatan	1,654,150	1,222,239	73.89

		11.1.8	Irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, PLP dan air minum Kab. Nias Selatan	769,114	436,506	56.75
		11.1.9	infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan NAD	5,198,170	2,853,246	54.89
		11.1.10	Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi Nias	16,748,367	6,742,564	40.26
		11.1.11	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP dan air minum Kab. Nias	50,459	-	0.00
		11.1.12	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil. I	10,236,425	7,996,489	78.12
12	Terbaiknya dan terbangunnya jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan untuk wilayah NAD - Nias	12.1.1	Pembangunan jalan dan jembatan wil I A	78,667,568	64,178,802	81.58
		12.1.2	Pengembangan kawasan percontohan NAD	12,465,393	8,549,986	68.59
		12.1.3	Jalan nasional NAD	627,816,139	371,247,745	59.13
		12.1.4	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi NAD	484,386,081	325,539,952	67.21
		12.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IV	19,882,272	12,844,927	64.60
		12.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V	50,773,518	44,891,374	88.41
		12.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. I	18,169,405	12,967,854	71.37
		12.1.8	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II	32,189,851	27,331,129	84.91
		12.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III	13,421,708	11,973,325	89.21
		12.1.10	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan Wilayah II	65,692,940	48,256,088	73.46
		12.1.11	Pemeliharaan, rehab, peningkatan dan pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias	156,577	19,360	12.36
		12.1.12	Perencanaan, rehab dan rekon jalan provinsi dan ketenagalistrikan Kabupaten Nias	233,916,207	166,324,092	71.10
		12.1.13	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten Nias	27,705,412	24,828,396	89.62
		12.1.14	Rehab dan rekon jalan Kabupaten Nias Selatan	609,027	432,569	71.03
		12.1.15	Rehab dan rekon jalan Kabupaten Nias Selatan.	37,845,032	24,152,502	63.82
		12.1.16	Pembinaan perencanaan jalan NAD	7,954,939	5,387,594	67.73

13	Terbangunnya dermaga, terminal dan bandara yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	13.1.1	Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wil. IA	30,086,135	29,369,720	97.62
		13.1.2	Rehab, peningkatan, pembangunan fasilitas pos, telekomunikasi dan transportasi udara NAD	300,280,065	298,872,140	99.53
		13.1.3	Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut NAD	249,407,311	205,172,068	82.26
		13.1.4	Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat NAD	161,403,032	123,827,614	76.72
		13.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah V	2,204,307	1,101,320	49.96
		13.1.6	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi nias	869,109	869,108	100.00
		13.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	2,763,874	2,464,521	89.17
		13.1.8	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III	7,319,708	4,533,659	61.94
		13.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	47,783,136	37,669,956	78.84
		13.1.10	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II	11,842,217	11,425,204	96.48
		13.1.11	Pemeliharaan, rehab, peningkatan dan pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias	13,656,008	9,564,096	70.04
		13.1.12	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias	64,107,447	63,351,149	98.82
14	Terbangunnya sistem drainase dan pengontrol banjir	14.1.1	Pembangunan prasarana pengendalian air NAD	176,622,139	14,792,600	8.38
		14.1.2	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IA	23,373,190	22,715,922	97.19
		14.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	14,440,513	12,157,219	84.19
		14.1.4	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II	75,407,145	63,990,920	84.86
		14.1.5	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah III	2,790,602	749,331	26.85
		14.1.6	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah IV	16,229,753	13,729,259	84.59
		14.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wilayah V	7,174,437	3,904,315	54.42
		14.1.8	Irigasi NAD	204,423,163	64,905,155	31.75
		14.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. V	31,312,445	30,911,880	98.72

		14.1.10	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	29,190,497	26,561,276	90.99
		14.1.11	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan wilayah II	14,628,819	10,456,664	71.48
		14.1.12	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP & air minum Kab. Nias Selatan	27,359,449	20,975,770	76.67
		14.1.13	Irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, PLP dan air minum Kab. Nias	33,284,749	26,859,007	80.69
		14.1.14	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana NAD Wil. I	3,000,000	2,768,951	92.30
15	Pulihnya dan terbangunnya infrastruktur gedung pemerintah dan prasarana	15.1.1	Pembangunan infrastruktur pemerintah NAD	201,059,630	184,081,533	91.56
		15.1.2	Rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Simeulue (IDB)	53,605,783	2,540,881	4.74
		15.1.3	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan Wil. IA	10,856,368	9,670,736	89.08
		15.1.4	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	83,893,234	63,055,995	75.16
		15.1.5	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II	147,075	36,761	24.99
		15.1.6	Pemeliharaan, rehab, peningkatan & pembangunan sarana & prasarana transportasi Nias	1,080,947	553,577	51.21
		15.1.7	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan wil. I	2,008,469	1,602,957	79.81
		15.1.8	Infrastruktur lingkungan dan pemeliharaan Wilayah II	598,746	560,323	93.58
		15.1.9	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan regional wilayah III	8,562,407	7,288,768	85.13
		15.1.10	Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan regional wilayah IV	2,283,548	1,599,402	70.04
		15.1.11	peningkatan kapasitas rekonstruksi infrastruktur NAD	297,383,757	100,826,325	33.90
		15.1.12	Perencanaan, rehab & rekon jalan provinsi dan ketenagalistrikan Kabupaten Nias	8,170,688	493,427	6.04
		15.1.13	Rehab & rekon jalan kabupaten Nias Selatan	383,452	203,477	53.06
		15.1.14	Penyelenggaraan dan pendaftaran bangunan gedung negara dan rumah negara NAD	130,221,214	111,692,497	85.77
		15.1.15	Pengembangan fasilitas polri	48,666,774	47,541,933	97.69
		15.1.16	Kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia Wil I	65,965,565	59,027,752	89.48

		15.1.17	15.1.17 Kelembagaan dan pengembangan SDM wilayah IV	15,506,955	12,537,783	80.85
		15.1.18	Peningkatan dan penataan kapasitas kelembagaan NAD-Nias	49,348,590	42,324,762	85.77
		15.1.19	Pusat pembelajaran dan pengembangan SDM	8,502,686	4,859,549	57.15
		15.1.20	Rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pulau Simeulue	113,333,325	87,783,796	77.46
16	Semakin kuatnya kapasitas aparatur pemerintahan	16.1.1	Dukungan bantuan pemerintah daerah-SPADA L	171,614,443	70,253,614	40.94
		16.1.2	Peningkatan sarana dan prasarana gedung keuangan negara	6,806,470	6,579,365	96.66
		16.1.3	Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Wil. V	11,167,298	10,094,984	90.40
		16.1.4	Penataan dan Pengelolaan SDM Aparatur NAD NIAS	53,652,201	50,027,923	93.24
		16.1.5	TNI angkatan udara L	553,766	541,264	97.74
		16.1.6	Pengembangan Sarpras Hukum NAD	9,622,030	6,784,605	70.51
		16.1.7	Penguatan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias	10,921,713	10,021,817	91.76
TOTAL				10,888,322,764	7,625,820,619	70.04

Rincian mengenai target dan realisasi penggunaan dana (sebagai indikator masukan/*input*) untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sedangkan rincian penggunaan anggaran per indikator sasaran dapat dilihat pada Lampiran 2.

Secara umum pelaksanaan akuntabilitas keuangan BRR telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan pada Laporan Keuangan Tahun 2007 dimana BRR mendapat predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Adapun informasi mengenai laporan keuangan BRR NAD – Nias tahun 2008 berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (*unaudited*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	35.718.603.815	35.718.603.815	0,00
A.1.a	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	35.718.603.815	35.718.603.815	0,00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0	35.718.603.815	35.718.603.815	0,00
B.	BELANJA				
B.1	BELANJA NEGARA				
B.1.1	Rupiah Murni	6.509.254.793.000	5.429.702.454.459	(1.079.552.338.541)	83,42
	Belanja Pegawai	445.203.024.000	375.196.917.821	(70.006.106.179)	84,28
	Belanja Barang	858.217.194.000	559.080.132.709	(299.137.061.291)	65,14
	Belanja Modal	3.311.157.147.000	2.817.550.963.674	(493.606.183.326)	85,09
	Bantuan Sosial	1.894.677.428.000	1.677.874.440.255	(216.802.987.745)	88,56
B.1.2	Pinjaman Luar Negeri	1.071.897.063.000	404.430.709.759	(667.466.353.241)	37,73
	Belanja Pegawai	370.000.000	0	(370.000.000)	0,00
	Belanja Barang	70.700.455.000	1.502.497.250	(69.197.957.750)	2,13
	Belanja Modal	984.112.479.000	402.928.212.509	(581.184.266.491)	40,94
	Bantuan Sosial	16.714.129.000	0	(16.714.129.000)	0,00
B.1.3	Hibah	3.307.170.908.000	1.784.908.237.767	(1.522.262.670.233)	53,97
	Belanja Pegawai	20.547.177.000	13.417.085.700	(7.130.091.300)	65,30
	Belanja Barang	627.339.709.000	207.622.540.205	(419.717.168.795)	33,10
	Belanja Modal	1.237.138.371.000	620.588.987.480	(616.549.383.520)	50,16
	Bantuan Sosial	1.422.145.651.000	943.279.624.382	(478.866.026.618)	66,33
JUMLAH BELANJA		10.888.322.764.000	7.619.041.401.985	(3.269.281.362.015)	69,97

Neraca Per 31 Desember 2008

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2008	2007	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.584.330.754	(3.584.330.754)	(100,00)
Kas PMU ReKOMPAK	33.830.599.610	59.060.265.372	(25.229.665.762)	(42,72)
Kas Komite Beasiswa	33.484.716.880	45.266.594.517	(11.781.877.637)	(26,03)
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	0	516.968.200	100,00

Uang Muka Belanja	68.345.423.730	1.203.629.376.124	(1.135.283.952.394)	(94,32)
Belanja dibayar dimuka	2.149.584.510	4.163.320.063	(2.013.735.553)	(48,37)
Persediaan	0	79.057.282.798	(79.057.282.798)	(100,00)
JUMLAH ASET LANCAR	138.327.292.930	1.394.761.169.628	(1.256.433.876.698)	(90,08)
ASET TETAP				
Tanah	976.421.508.321	661.558.584.250	314.862.924.071	47,59
Peralatan dan Mesin	1.518.387.322.744	1.267.341.040.658	251.046.282.086	19,81
Gedung dan Bangunan	3.132.980.074.828	962.184.487.864	2.170.795.586.964	225,61
Jalan Irigasi dan Jaringan	4.552.016.228.688	1.943.615.382.745	2.608.400.845.943	134,20
Aset Tetap Lainnya	26.628.707.111	17.892.662.934	8.736.044.177	48,82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.061.530.672.825	2.592.836.178.072	(1.531.305.505.247)	(59,06)
JUMLAH ASET TETAP	11.267.964.514.517	7.445.428.336.523	3.822.536.177.994	51,34
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	729.419.877.785	486.293.304.867	243.126.572.918	50,00
JUMLAH ASET LAINNYA	729.419.877.785	486.293.304.867	243.126.572.918	50,00
JUMLAH ASET	12.135.711.685.232	9.326.482.811.018	2.809.228.874.214	30,12
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	0	3.584.330.754	(3.584.330.754)	(100,00)
Utang kepada Pihak Ketiga	67.315.316.490	105.954.502.049	(38.639.185.559)	(36,47)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	67.315.316.490	109.538.832.803	(42.223.516.313)	(38,55)
JUMLAH KEWAJIBAN	67.315.316.490	109.538.832.803	(42.223.516.313)	(38,55)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	70.495.008.240	1.207.792.696.187	(1.137.297.687.947)	(94,16)
Cadangan Persediaan	0	79.057.282.798	(79.057.282.798)	(100,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	70.495.008.240	1.286.849.978.985	(1.216.354.970.745)	(94,52)

EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.268.481.482.717	7.443.800.694.363	3.824.680.788.354	51,38
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	729.419.877.785	486.293.304.867	243.126.572.918	50,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	11.997.901.360.502	7.930.093.999.230	4.067.807.361.272	51,30
JUMLAH EKUITAS DANA	12.068.396.368.742	9.216.943.978.215	2.851.452.390.527	30,94
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.135.711.685.232	9.326.482.811.018	2.809.228.874.214	30,12

D. PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, masa tugas BRR akan berakhir pada tanggal 16 April 2009. Selanjutnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR akan dibentuk Badan Kesiambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKRR) untuk Aceh dan Kepulauan Nias yang dipimpin oleh gubernur provinsi setempat.

Dalam rentang waktu tahun 2005 s.d 2008, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BRR mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp31.941.753.291,-**. Jumlah ini mencakup sumber dana dari rupiah murni, hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri. Sedangkan realisasi penggunaan dananya mencapai **Rp24.554.251.996,-** atau sebesar 76,87%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk wilayah NAD dan Nias dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	NAD		Nias	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2005	3.576.511.001	394.212.320	420.441.499	20.450.442
2006	9.323.198.489	8.750.411.073	1.199.779.741	1.229.858.548
2007	9.243.980.903	5.787.219.983	1.177.440.518	746.279.010
2008	6.178.830.766	6.796.292.734	821.570.374	829.527.886
Jumlah	28.322.521.159	21.728.136.110	3.619.232.132	2.826.115.886

Dari total realisasi anggaran sebesar Rp24.554.251.996,- tersebut diatas, jumlah yang dikapitalisasi menjadi aset milik negara termasuk perumahan yang diserahkan kepada masyarakat berjumlah Rp17.726.952.000 atau 76,94%. Dari jumlah tersebut aset yang telah serah terimakan sebesar Rp 10,085,300,478,347 atau 58,82% yang terdiri dari aset BMN sebesar Rp4.681.166.478.347 dan aset perumahan sebesar Rp5.404.134.000.000. sedangkan sisa aset yang belum diserahterimakan sebesar Rp7.641.651.521.653 diharapkan dapat diserahterimakan semua sebelum berakhirnya BRR NAD-Nias. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 3 tahun 2009, sebelum berakhirnya masa tugas BRR diharapkan dapat menyelesaikan proses

penyerahan seluruh aset kekayaan negara kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Yayasan Keagamaan/Sosial, Kemanusiaan, Kelompok Masyarakat atau pihak lainnya dalam rangka penetapan status dan pemindahtanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepentingan pencatatan aset kekayaan milik negara agar transparan dan akuntabel serta memudahkan para stakeholder mendapatkan informasi tentang aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Direktorat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR telah membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi manajemen aset yang bernama SIMAS. Aplikasi SIMAS ini merupakan sistem pendukung dan pelengkap atas sistem pencatatan aset yang secara resmi digunakan oleh Departemen Keuangan RI dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Proses pencatatan data aset di SIMAS dimulai dari validasi terhadap aset BMN yang akan dijadikan dasar untuk kegiatan inventarisasi terhadap fisik aset untuk meyakini keberadaannya, kepemilikan, nilai perolehannya, kondisi, pemanfaatan serta lokasi tempat aset tersebut berada. Informasi aset yang tercantum dalam SIMAS antara lain meliputi data tekstual, foto dan koordinat (geospasial). Dalam perkembangannya aplikasi SIMAS telah disesuaikan sehingga kompatibel dengan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Pengembangan aplikasi tersebut tidak tertuang didalam Renstra BRR NAD-Nias, namun demikian diharapkan dapat dimanfaatkan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan pada saat berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang diberi tugas untuk melakukan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, BRR telah berusaha untuk menjalankan amanat tersebut dengan sungguh-sungguh. Pencapaian rata-rata sasaran kinerja dengan kategori “baik” menunjukkan bahwa kegiatan BRR secara umum dapat dikatakan berhasil. Setelah menjalankan kegiatannya dalam kurun waktu 2005-2008, telah banyak hal yang dapat dilakukan BRR NAD-Nias dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa bumi dan tsunami di NAD dan Nias. Hasil kerja BRR NAD-Nias pun telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh dan Nias.

Keberhasilan dan kegagalan merupakan sesuatu hal yang sangat mungkin dialami oleh suatu organisasi. Apalagi dalam organisasi seperti BRR NAD – Nias yang mempunyai tugas berat dan harus dilaksanakan dalam waktu yang terbatas. BRR NAD-Nias selama tahun 2008 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tentu juga mengalami keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat sasaran dengan tingkat capaian kurang. Hal ini membuktikan bahwa BRR NAD – Nias memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan disegala bidang. Selain itu berdasarkan indikator outcome yang tersedia juga dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias telah kembali pada situasi normal seperti sebelum bencana, bahkan beberapa indikator diantaranya menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup berarti.

Keberhasilan capaian kinerja rata-rata sebesar **80,98%** pada tahun 2008 ini merupakan salah satu usaha perbaikan nyata dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja). Renstra dan Renja disusun secara seimbang diantara berbagai bidang, terbentuk dari kesadaran memberikan sumbangan kegiatan secara proporsional dan logis bagi pencapaian kinerja sasaran BRR NAD – Nias. Dengan demikian, kinerja sasaran tidak lagi secara eksklusif menjadi tanggung jawab suatu satuan kerja saja, melainkan suatu gabungan sumbangan berbagai satuan kerja terkait. Disamping itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud dari kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat kepada BRR NAD – Nias untuk terus melakukan perbaikan dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan mereka.

Menjelang berakhirnya masa tugas pada April 2009, BRR tentunya akan berusaha menyelesaikan berbagai kekurangan dan masalah yang dihadapi terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009 maka sasaran program tahun 2009 sebagai kesinambungan sasaran dalam Rencana Induk yang sebagian telah dilaksanakan oleh BRR menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. Untuk itu beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan BRR menjelang berakhirnya masa tugas diantaranya adalah :

1. Memanfaatkan sisa waktu dan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai semua kegiatan yang telah dilaksanakan, dan segera mengambil tindakan perbaikan apabila dijumpai permasalahan di lapangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mepercepat proses serah terima Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga;
4. Mendorong pihak-pihak yang berkompeten agar segera menyiapkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

